

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai bencana jika manusia memperoleh dampak berupa kerugian dari fenomena tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. (Republik Indonesia, 2007)

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 62.58 (sedang). (W. Adi et al, 2023). DKI Jakarta adalah kota dengan luas wilayah 661,52 km<sup>2</sup>. Sekitar 40% wilayahnya adalah dataran rendah dan ketinggian rata-rata berada di bawah permukaan air laut. Jakarta memiliki curah hujan tinggi dengan kemiringan wilayah sebagai tempat bertemunya sungai-sungai dari bagian selatan. Sedikitnya terdapat 13 sungai yang mengalir dan bermuara di Teluk Jakarta. Maka wajar kondisi ini menyebabkan wilayah DKI Jakarta sangat rentan terhadap banjir. (BPBD DKI Jakarta, 2024)

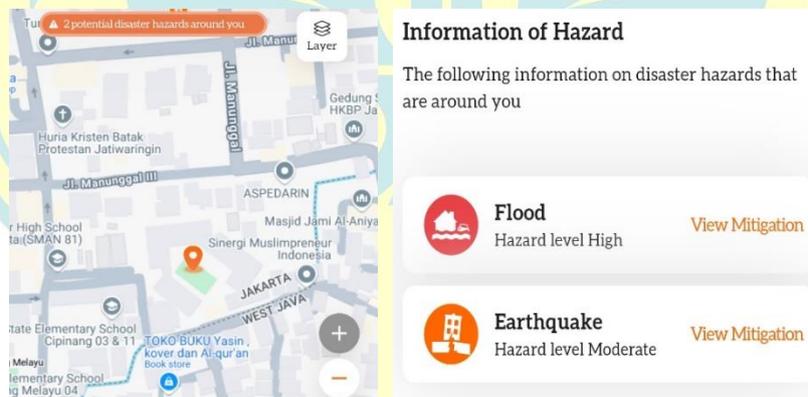
Upaya yang tepat untuk meminimalisir risiko bencana adalah menambah pengetahuan tentang kebencanaan ke dalam bidang pendidikan. Sektor pendidikan tentu berperan penting dalam penanggulangan bencana, sehingga memajukan peserta didik untuk mempunyai kesiapsiagaan terhadap bencana (Pahleviannur & Hafida, 2022). Dengan pendidikan diharapkan adanya upaya untuk mengurangi risiko bencana mampu mencakup sasaran lebih banyak dan luas lagi terutama untuk semua peserta didik, serta menggabungkan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah ataupun ke dalam kegiatan ekstrakurikular. (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus et al., 2021)

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 75% dari total 355.270 bangunan sekolah di Indonesia terletak di daerah berisiko sedang hingga tinggi. Tingkat risiko tersebut tentunya kian bertambah seiring dengan banyaknya bangunan sekolah yang berusia tua, minim perawatan dan tidak sedikit dibangun seadanya tanpa memperhatikan standar bangunan gedung (Lilik et al, 2016). Shaluf berpendapat bahwa lingkungan sekolah dapat terdampak berbagai jenis bencana. Bencana alam, kemudian bencana akibat perilaku tidak bertanggungjawab manusia, lalu bencana hibrida merupakan klasifikasi jenis bencana, ketiga jenis bencana tersebut diyakini mencakup semua kejadian bencana (Widodo et al., 2024). Semestinya bagi anak-anak dan guru sekolah harus menjadi tempat yang aman (Ramadhani et al., 2020). Oleh karenanya, melalui sekolah aman bencana adalah cara untuk pengurangan risiko bencana di sekolah.

Suatu upaya untuk menjamin kesiapsiagaan bencana di sekolah diantaranya adalah yaitu mengimplementasikan program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB). Berkaitan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2012 Sekolah Aman Bencana merupakan sekolah yang mengimplementasikan standar sarana dan prasarana serta budaya yang berupaya melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Target yang diutamakan dari program SMAB ialah memberikan keselamatan dan perlindungan untuk warga sekolah dari akibat terburuk bencana bahkan kematian di sekolah. Program ini dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2016 dengan tujuan membantu warga sekolah untuk meminimalisir ancaman dan dampak terburuk dari bencana atau sebagaimana mestinya memberikan edukasi penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pilar kerangka kerja struktural dan non-stkrutural sekolah aman diantaranya adalah fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana (Nurwin et al., 2015).

Semua warga sekolah khususnya anak dapat mengambil manfaat dari pendidikan keamanan di sekolah sebagai tindakan pencegahan terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Ariani, 2021). Selain itu Hamid berpendapat dimana pendidikan kebencanaan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana (Widodo et al., 2024). Sehingga, adanya pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan menimbulkan rasa kesadaran diri bagi semua pihak di sekolah agar waspada terhadap bencana.

SMAN 81 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas yang terpilih menerima kegiatan program Sekolah/Madrasah Aman Bencana dari BPBD DKI Jakarta di tahun 2018. Kegiatan program SMAB yang dilaksanakan beberapa tahun lalu adalah dengan memberikan sosialisasi terkait kebencanaan dan SMAB kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 81 Jakarta. Berdasarkan hal ini diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah tentang penanggulangan bencana di sekolah maka SMAN 81 Jakarta dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman bencana.



**Gambar 1.** Ancaman Bencana di Wilayah SMA Negeri 81 Jakarta

Sumber: InaRISK Personal, 2024

SMAN 81 Jakarta terletak tidak jauh dari Kali Buaran. Berdasarkan studi literatur yang peneliti dapatkan tingkat ancaman bencana di wilayah SMA Negeri 81 Jakarta skala tinggi mengalami banjir dan skala sedang mengalami gempa bumi (InaRISK Personal, 2024). Kemudian melalui platform YouTube akun resmi SMAN 81 Jakarta, pada tahun 2020 awal disaat sedang libur

sekolah, SMAN 81 Jakarta mengalami banjir diakibatkan curah hujan tinggi menyebabkan meluapnya air dari saluran air dan kali terdekat sehingga berdampak pada rusaknya fasilitas sekolah hal ini dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut ini:



**Gambar 2.** Kondisi sekolah saat banjir tahun 2020  
Sumber: YouTube SMAN 81 Jakarta, 2020

Penerapan sekolah/madrasah aman bencana bertujuan menumbuhkan kesiapsiagaan warga sekolah untuk meminimalisir dampak risiko bencana sehingga akan terciptanya sekolah aman bagi seluruh warga sekolah. Namun belum diketahui seberapa besar pengimplementasian sekolah setelah mendapatkan pendampingan sosialisasi dari BPBD DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu dikaji untuk mengetahui seberapa besar tingkat implementasi program tersebut berdasarkan ketiga pilar SMAB. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai Implementasi Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) di SMA Negeri 81 Jakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sekolah harus menjadi tempat yang aman.
2. Upaya pengurangan risiko bencana perlu dihadirkan ke dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan.
3. Warga sekolah perlu memiliki pengetahuan dan pengetahuan dan memahami tindakan tepat dalam menghadapi bencana.

4. SMA Negeri 81 Jakarta pernah mengalami bencana banjir.
5. Perlu mengetahui gambaran implemementasi program SMAB di SMA Negeri 81 Jakarta.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang dilaksanakan SMA Negeri 81 Jakarta berdasarkan ketiga pilar SMAB.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana tingkat implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana di SMA Negeri 81 Jakarta?”.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akademis serta pengalaman belajar peneliti selama masa kuliah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Institusi pendidikan**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah kepustakaan dan pengetahuan mengenai Implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana di tingkat SMA/ sederajat.

##### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat mengembangkan penelitian tentang Implementasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana di tingkat SMA/ sederajat.

##### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam mengupayakan sekolah aman dalam menghadapi bencana banjir.